

Akses dan Kesetaraan Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Selama Pemberlakuan Otonomi Khusus

Person Elopere¹ Fricean Tutuarima² Andreas M D Ratuanak³

Univesitas Pattimura, Indonesia^{1,2,3}

Email: personelopere02@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini mengkaji akses dan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, selama pemberlakuan Otonomi Khusus. Kajian difokuskan pada rasio sekolah dan guru, kondisi sarana prasarana, serta faktor sosial, ekonomi, geografis, dan budaya yang memengaruhi pemerataan pendidikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa meski jumlah sekolah dan alokasi Dana Otsus meningkat, pemerataan akses belum optimal. Ketimpangan guru dan fasilitas, sulitnya akses geografis, kemiskinan, rendahnya kesadaran pendidikan, serta lemahnya pengawasan kebijakan menjadi kendala utama. Otsus dinilai belum signifikan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Disarankan reformulasi kebijakan berbasis konteks lokal, alokasi anggaran tepat sasaran, dan penguatan peran masyarakat adat.

Kata Kunci: Akses Pendidikan, Kesetaraan, Otonomi Khusus

Abstract

This study examines access to and equality in education in Jayawijaya Regency, Papua Highlands, during the implementation of Special Autonomy. The study focused on the school-to-teacher ratio, the condition of infrastructure, and social, economic, geographic, and cultural factors that influence educational equality. The method used was descriptive qualitative, with data collected through observation, interviews, literature review, and documentation. The results indicate that despite an increase in the number of schools and the allocation of Special Autonomy Funds, equitable access is not yet optimal. Inequality in teachers and facilities, difficult geographic access, poverty, low educational awareness, and weak policy oversight are the main obstacles. Special Autonomy is considered to have not significantly improved the quality and equality of education. It is recommended that policy reformulation be based on the local context, targeted budget allocation, and empowerment of indigenous communities

Keywords: Access to Education, Equality, Special Autonomy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Abd Majid, 2014). Pendidikan menjadi hal yang sangat krusial bagi setiap orang. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program wajib sekolah. Bahkan pentingnya pendidikan juga terlihat dari besarnya APBN yang disediakan oleh pemerintah untuk bidang pendidikan sebesar 20%. Menurut Modouw menyebutkan bahwa pada prinsipnya terdapat tiga aspek di dalam istilah pendidikan yang saling mengisi yaitu usaha sadar dan terencana, memengaruhi atau menciptakan lingkungan yang menunjang pembelajaran, serta perubahan dan kemampuan diri (Syafii, 2018). Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan bagaimanakah Bentuk Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Menurut Peraturan PerUndang-Undangan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan, Penyediaan fasilitas pendidikan merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana yang

diamanatkan melalui Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (K. D. Pendidikan et al., 2016). Oleh karena itu pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang, karena pendidikan menjadi hak bagi setiap warga negara. Pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, anak-anak maupun orang dewasa yang sudah memenuhi usia sekolah. Indonesia adalah negara yang memiliki aturan, kebijakan, dan undang-undang yang lengkap tentang pendidikan, akan tetapi dalam implementasinya sering kali terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang semestiknya.

Di Indonesia terdapat kebijakan Otonomi khusus yang dimana Otonomi khusus merupakan pemberian kewenangan khusus yang diserahkan dan diakui kepada suatu daerah untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa daerah dan juga atas aspirasi masyarakat daerah. Meski diberi label dengan nama otonomi khusus, namun daerah terkait tidak bisa lepas dari sistem pemerintahan nasional. (Rahman & Kartini, 2023). Wolff berpandangan, bahwa otonomi khusus dapat dimaknai sebagai upaya yang harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di suatu daerah. Selain itu, otonomi khusus dilaksanakan untuk memberikan keadilan dan kesetaraan bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan bahkan didiskriminasi, khususnya di bidang pendidikan (Marrit, 2018). Kebijakan otonomi khusus bertujuan untuk memberikan resolusi konflik dan perspektif baru dalam pemerintahan daerah. Harapan mendasar dari otonomi khusus adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di berbagai sektor, antara lain pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya (Oktavian et al., 2021).

Secara khusus, program otonomi khusus harus memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor pendidikan. Pemanfaatan dana alokasi otonomi khusus yang relatif lebih besar dari berbagai daerah lain sangat krusial dalam optimalisasi sektor pendidikan. Optimalisasi sektor pendidikan menjadi bagian yang sangat penting mengingat indikator kemajuan suatu daerah juga dinilai dari indeks pembangunan manusia, hal ini mempunyai korelasi yang kuat dengan sektor pendidikan (Amin et al., 2020). Kebijakan otonomi khusus diberikan kepada beberapa daerah dengan tujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola potensi dan kekhasan daerah masing-masing, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu daerah yang mendapatkan status otonomi khusus adalah di daerah Papua. Provinsi Papua pegunungan kabupaten jayawijaya merupakan salah satu daerah yang mendapatkan program otonomi khusus. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pegunungan kabupaten jayawijaya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pegunungan kabupaten jayawijaya. Lahirnya otonomi khusus bagi Provinsi Papua pegunungan kabupaten jayawijaya dirujuk dari perjalanan panjang yang akhirnya melahirkan kompromi secara politik antara masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia guna menyelesaikan persoalan multidimensi berkepanjangan sejak tahun 1962. (Rahman & Kartini, 2023) Hadirnya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pegunungan kabupaten jayawijaya juga merupakan bertanda lahirnya arah baru dalam mengoptimalisasi sektor pendidikan bagi masyarakat Papua pegunungan kabupaten jayawijaya. Hal tersebut termuat dalam salah satu program skala prioritas Pemerintah provinsi Papua pengunungan kabupaten jayawijaya, yakni penguatan pendidikan. Khususnya bagi masyarakat pedalaman dan pesisir (Eryanto et al., 2021). Optimalisasi sektor pendidikan juga menjadi salah satu hal yang sangat penting sebagai dampak kebermanfaatan adanya otonomi khusus. Hal ini krusial sebab tingginya disparitas baik secara mutu maupun infrastruktur pendidikan di Provinsi Papua pegunungan kabupaten jayawijaya. (Rahman & Kartini, 2023).

Faktor-faktor penghambat kinerja pendidikan di kabupaten jayawijaya provinsi papua pegunungan antara lain; Pertama, faktor infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah Jumlah gedung dan kondisi gedung sekolah yang kurang, dan tidak layak untuk belajar mengajar, sehingga mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten jayawijaya provinsi papua. Faktor kedua, Masih terjadinya konflik di provinsi papua pegunungan, konflik antara, suku, dan juga konflik yang terjadi disebabkan karena kurang adanya kesenjangan ekonomi, sosial, dan tidak terpenuhinya hak politik masyarakat di wilayah kabupaten jayawijaya provinsi papua pegunungan. Daerah yang memiliki potensi konflik yang sangat besar, sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten provinsi papua pegunungan; faktor ketiga anggaran otonomi khusus memiliki manfaat salah satunya adalah menunjang sarana dan prasarana pendidikan, akan tetapi masih ada sekolah sampai saat ini, belum merasakan kondisi fisik, baik itu bangunan sekolah dan jalan, sehingga mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di kabupaten jayawijaya provinsi papua pegunungan faktor keempat, kurangnya pendistribusi guru dan pendidikan di daerah terpencil yang ada di kabupaten jayawijaya provinsi papua pegunungan, sehingga anak anak papua yang tinggal didaerah pedalaman tidak bisa sekolah.

Di sisi lain Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama. Banyak keluarga miskin di kabupaten jayawijaya provinsi papua pegunungan yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya, mulai dari biaya sekolah, hingga transportasi. Kemudian, faktor geografis juga turut mempengaruhi pendidikan di provinsi papua. Daerah tertinggal umumnya memiliki infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, seperti sekolah yang rusak, kekurangan guru, dan minimnya fasilitas belajar mengajar. Ditambah lagi, kesulitan akses transportasi dan jarak ke sekolah di daerah terpencil menjadi penghalang tersendiri bagi anak-anak untuk menempuh pendidikan. Faktor sosialpun tidak bisa diabaikan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti anak berkebutuhan khusus atau anak dari keluarga yang di marginalkan, sehingga dapat membuat mereka terpinggirkan dari dunia pendidikan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan praktik pernikahan anak di usia remaja pun turut menjadi faktor penghambat kesempatan anak untuk menempuh pendidikan. Dampak akses dan kesetaraan pendidikan di kabupaten jayawija provinsi papua pegunungan sangat merugikan, baik itu individu, maupun bangsa. Bagi individu, terbatasnya akses dan kesetaraan pendidikan dapat membuat mereka tidak memiliki peluang kerja yang lebih sedikit dan berpenghasilan rendah. Mereka juga rentan terhadap berbagai masalah sosial, yankni seperti kemiskinan, geografis yang sangat luas, dan kurangnya distribusi guru dan pendidikan di daerah pedesaan, serta jarak sekolah dan tempat tinggal warga di provinsi papua pegunungan pada umumnya senhigga anak anak papua yang berada di pedesaan sulit untuk menempu pendidikan.

Berdasarkan beberapa penjabaran faktor-faktor sebelumnya di atas, maka fokus penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan otonomi khusus terhadap peningkatan sektor pendidikan di kabupaten jayawijaya Provinsi Papua pegunungan. Studi ini juga berupaya untuk menemukan berbagai faktor kendala yang menyebabkan otonomi khusus belum berdampak optimal dalam meningkatkan kualitas di sektor pendidikan bagi masyarakat Provinsi Papua pegunungan kabupaten jayawijaya. Studi ini menjadi penting guna melihat bagaimana dampak otonomi khusus serta faktor faktor yang berkaitan dengan hambatannya dalam mengoptimalisasi sektor pendidikan dan bagaimana rasio kertsediaan sekolah dan guru di Provinsi Papua pegunungan Kabupaten jayawijaya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis ingin menyempurnakan penelitian-peneltian sebelumnya dengan mencoba melihat dampak dari Otonomi Khusus di Provinsi Papua pegunungan kabupaten jayawijaya terhadap pembangunan sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan. maka

penulis ingin mengangkat judul penelitian tentang “Akses dan Kesetaraan Pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Jayawijaya Selama Pemberlakuan Otonomi Khusus.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat, guru, kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rasio ketersediaan sekolah dan guru serta akses dan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan selama pemberlakuan otonomi khusus. Data diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dengan informan utama (tokoh masyarakat, kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan aparat pemerintah daerah), serta dokumentasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.

Rasio Ketersediaan Sekolah dan Guru di Kabupaten Jayawijaya

Ketersediaan sekolah dan guru menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas akses dan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan serta pengamatan langsung di lapangan, diketahui bahwa meskipun secara administratif jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya terhitung cukup, namun penyebarannya sangat tidak merata. Kesenjangan paling nyata terjadi antara wilayah pusat (Wamena) dan distrik-distrik pedalaman. Data yang peneliti dapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya bahwa hingga tahun 2025, terdapat 207 unit Sekolah Dasar (SD), 76 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 25 Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya. Namun demikian, lebih dari 60% sekolah-sekolah tersebut terkonsentrasi di distrik-distrik sekitar Kota Wamena. Untuk memperkuat data di atas maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Bapak Natalis Mumpu. S.Sos mengatakan bahwa: “Betul kalau kita lihat data jumlah sekolah, memang angka-angka itu ada. Tetapi coba lihat sebarannya. Di distrik-distrik seperti Pelebag, Pisugi, Itlay Hisage, dan distrik pegunungan lainnya, ada yang satu kampung hanya punya satu sekolah dasar saja. Bahkan ada kampung yang sama sekali belum pernah dibangun sekolah. Kalau SMP dan SMA, malah lebih parah banyak anak-anak kita yang harus ke Wamena hanya untuk bisa sekolah menengah.” (Wawancara, 17 Februari 2025)

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa ketersediaan guru tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga soal kehadiran dan keberlanjutan tugas mereka di tempat. “Guru banyak yang terdaftar di Dapodik. Tetapi coba cek di lapangan, banyak yang tidak pernah hadir di tempat tugas. Terutama yang ditempatkan di pedalaman. Ada yang hanya datang di awal tahun pelajaran, setelah itu tidak kelihatan lagi. Jadi, sekolah yang tercatat aktif, di kenyataan seringkali tidak ada aktivitas belajar mengajar.” (Wawancara, 17 Februari 2025) Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Ipmres Kulagaima Nikolaus Elopere. M.Pd. SE. Distrik Wamena Ia menyampaikan bahwa: “Di kota Wamena, sekolah-sekolah relatif jalan. Guru hadir, fasilitas lumayan. Tapi di distrik lain, banyak sekolah yang kosong. Ada kepala sekolah di Pisugi cerita ke saya, di tempatnya, cuma ada dua guru. Kepala sekolahnya sendiri merangkap jadi guru kelas 1 sampai kelas 6. Itu pun guru honorer. Sementara guru PNS seringkali tidak ada di tempat.” (Wawancara, 19 Februari 2025) Selanjutnya untuk di tempat yang berbeda peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala SMP Negeri I Kurulu Veronika Sorabut di Distrik Kurulu menyampaikan bahwa: “Kami hanya punya empat guru tetap, itupun

dua di antaranya tidak mengajar sesuai bidangnya. Guru IPA tidak ada, guru Bahasa Inggris tidak ada. Akhirnya, saya sendiri sebagai kepala sekolah terpaksa mengajar juga. Untuk mata pelajaran yang tidak ada gurunya, yang tidak diajarkan sama sekali. Ini realitas kami di sini.” (Wawancara, 22 Ferbuari 2025)

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Asologaima Johny Sangawuring mengungkapkan permasalahan yang lebih kompleks. Di distrik tersebut, hanya terdapat satu SMA negeri, itupun beroperasi dalam kondisi yang jauh dari ideal. Guru-guru yang seharusnya bertugas sering kali tidak hadir, sementara sarana pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan nyaris tidak ada. “Di SMAN Asologaima, kami jumlah guru tidak sampai lima orang. Tiga guru PNS dan dua honorer. Tapi yang aktif mengajar paling dua orang saja. Banyak anak-anak di sini yang akhirnya putus sekolah atau terpaksa ke Wamena. Di sini bukan cuma kurang guru, tapi juga fasilitas seperti buku dan alat praktik sama sekali tidak ada.” (Wawancara, 26 Ferbuari 2025) Senada dengan itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD YPPGI Piramid mengatakan bahwa: “Saya cuma beremapt ditambah kepala sekolah kami. Kadang kalau kepala sekolah ada urusan di distrik, kita bertiga yang mengajar semua kelas. Tidak ada guru agama, tidak ada guru olahraga, apalagi Bahasa Inggris. Saya sendiri kadang harus mengajar kelas 1 sampai kelas 6 bergantian. Ini beban berat, tapi kami tidak punya pilihan.” (Wawancara, 29 Ferbuari 2025. Hasil observasi peneliti juga memperkuat temuan wawancara tersebut. Di distrik Itlay Hisage dan Pisugi, ditemukan sekolah dasar yang hanya memiliki satu guru aktif, sementara kondisi fisik sekolahnya sangat memprihatinkan dinding bambu, lantai tanah, dan atap bocor. Beberapa SMP di distrik pedalaman dilaporkan hanya buka dua hingga tiga kali dalam seminggu karena keterbatasan guru. Bahkan ada sekolah yang tetap tercatat aktif di administrasi dinas, namun tidak pernah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sepanjang semester berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Distribusi sekolah di Kabupaten Jayawijaya sangat tidak merata, dengan konsentrasi satuan pendidikan di wilayah pusat dan kekosongan di wilayah-wilayah distrik pedalaman.
2. Rasio guru terhadap jumlah siswa sangat rendah, terutama di daerah pedalaman. Banyak guru berstatus ASN tidak hadir di tempat tugas, sementara guru honorer bekerja dengan kondisi yang serba terbatas.
3. Minimnya pengawasan dan lemahnya kebijakan monitoring dari Dinas Pendidikan memperparah kondisi ini, sehingga ketidakhadiran guru dan tidak berjalannya sekolah dianggap hal yang biasa.
4. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tidak adanya fasilitas pendukung seperti rumah dinas guru menjadi penyebab utama ketimpangan ini.
5. Dampak langsungnya terlihat dari rendahnya partisipasi sekolah, tingginya angka putus sekolah, serta rendahnya kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak di distrik pedalaman Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan temuan lapangan maka peneliti menyimpulkan bahwa kondisi rasio ketersediaan sekolah dan guru di Kabupaten Jayawijaya mencerminkan adanya permasalahan serius dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kabupaten jayawijaya. Upaya pemerintah melalui alokasi Dana Otonomi Khusus belum mampu mengatasi ketimpangan distribusi sekolah dan guru, khususnya di daerah-daerah pedalaman. Hal ini berimplikasi langsung terhadap akses pendidikan yang semakin terbatas bagi anak-anak di wilayah terpencil, serta memperbesar kesenjangan pendidikan antara masyarakat di perkotaan dan pedalaman.

Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen dasar yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan proses pembelajaran dan pemerataan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, Tokoh Masyarakat, serta observasi langsung di lapangan, ditemukan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, khususnya di distrik pedalaman, berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Ketimpangan kondisi antara wilayah pusat (Wamena) dan daerah-daerah pedalaman sangat nyata. Di Wamena dan beberapa distrik sekitar, kondisi bangunan sekolah relatif baik dengan sarana pendukung yang memadai. Namun, di distrik-distrik pedalaman seperti Pisugi, Pelebaga, Itlay Hisage, Pyramid, Hubikosi, dan Asologaima, hampir seluruh satuan pendidikan mengalami kekurangan sarana dan prasarana yang serius. Berkaitan dengan apa yang menjadi kendala utama pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, maka peneliti melakukan wawancara dengan kepala dinas pendidikan kabupaten Jayawijaya Natalis Mumpu. S.Sos mengatakan bahwa: "Membangun satu ruang kelas saja di distrik seperti Itlay Hisage atau Pelebaga, biayanya bisa dua atau tiga kali lipat dibanding di Wamena. Karena material harus diangkut lewat jalan dengan medan yang sangat beresiko bahkan pakai helikopter. Alhasil, banyak sekolah hanya dibangun seadanya, bahkan ada yang masih berlantaikan tanah, tanpa meja dan kursi. Yang lebih miris, banyak sekolah yang rusak bertahun-tahun tapi tidak bisa diperbaiki karena anggaran tersedot untuk biaya transportasi." Selanjutnya di tempat yang berbeda peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala SMP Negeri I Kurulu Veronika Sorabut di Distrik Kurulu menyampaikan bahwa: "Dinding kelas pakai papan, berlantai lantai semen kasar. Meja dan kursi tidak cukup, jadi anak-anak ada yang duduk di lantai. Kami tidak punya toilet, tidak ada ruang guru. Kalau ada tamu, kami pinjam kursi dari gereja. Beliau juga mengungkapkan bahwa proposal pengajuan bantuan sarana ke Dinas Pendidikan seringkali tidak mendapat tanggapan, atau jika disetujui, proses realisasinya sangat lambat.

Senada dengan itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD YPPGI Piramid mengatakan bahwa: "Kami tidak punya laboratorium, perpustakaan ada tetapi masih terbatas, air bersih tidak ada. Sementara itu, Kepala SMAN 1 Asologaima Johny Sangawuring mengungkapkan gambaran kondisi yang lebih serius di sekolahnya mengatakan: "Kami punya 7 ruang kelas, tapi tidak semua bisa dipakai. Tidak ada laboratorium IPA, kami hanya punya 2 buah komputer, perpustakaan ada tapi masih sangat terbatas buku. Listrik kita sudah cukup baik. Selanjutnya berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten jayawijaya khususnya di distrik pedalaman Hisage peneliti melakukan wawancara dengan seorang tokoh masyarakat di distrik pedalaman Hisage Yohanis Elopere mengatakan: "Kami sudah sering usul, tapi tidak pernah respon. Anak-anak kami belajar di sekolah yang belum memadai seperti di wamena. Harapn kami agar pementarintah dapat memperhatikan kami di daerah pedalaman juga kami orang kampung jadi pikir lebih baik anak di kebun saja hal ini yang bikin pendidikan di sini tidak maju." Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan pada distrik Itlay Hisage, Pelebaga, dan Pisugi, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kondisi fisik sekolah di distrik pedalaman sangat memprihatinkan, baik dari segi bangunan, peralatan belajar, maupun fasilitas pendukung.
2. Ketimpangan sarana antara wilayah Wamena dan distrik pedalaman sangat tinggi, dengan pedalaman nyaris tidak mendapatkan perhatian.
3. Tidak adanya rumah dinas guru dan fasilitas dasar menyebabkan guru enggan menetap di daerah tugasnya.

4. Faktor biaya transportasi dan lemahnya kebijakan distribusi anggaran memperparah ketimpangan ini.
5. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pendidikan, yang berimbas pada tingginya angka ketidakhadiran siswa dan tingginya angka putus sekolah.

Maka dapat di simpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya mencerminkan adanya ketimpangan struktural yang serius antara pusat dan daerah pedalaman. Ketidaklayakan infrastruktur pendidikan berdampak langsung terhadap proses pembelajaran, motivasi guru, dan minat belajar siswa. Ketimpangan ini bukan semata disebabkan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh lemahnya komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan pendidikan. Kondisi ini, jika tidak segera ditangani, berpotensi memperparah ketertinggalan pendidikan di wilayah pedalaman Kabupaten Jayawijaya.

Aksesibilitas Pendidikan

Aksesibilitas pendidikan merujuk pada kemudahan yang dimiliki masyarakat, khususnya anak usia sekolah, dalam mendapatkan layanan pendidikan. Faktor aksesibilitas di Kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, infrastruktur transportasi, jarak tempuh ke sekolah, serta keterbatasan fasilitas pendukung lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, diperoleh fakta bahwa kendala aksesibilitas menjadi salah satu penyebab rendahnya angka partisipasi pendidikan, terutama di distrik-distrik pedalaman. Berkaitan dengan aksesibilitas Pendidikan maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Bapak Natalis Mumpu. S.Sos mengatakan: "Kalau di Wamena dan sekitarnya, anak-anak relatif mudah ke sekolah karena ada jalan dan transportasi sudah cukup memadai. Tapi di distrik-distrik pedalaman, akses sangat sulit. Ada yang harus jalan kaki berjam-jam, melewati sungai dan pegunungan. Di musim hujan, banyak sekolah yang tidak bisa diakses sama sekali. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab banyak anak di pedalaman tidak melanjutkan sekolah, terutama ke SMP dan SMA. Dan ini juga menjadi PR bagi kami dinas terkait. Dan kami akan berupaya untuk melakukan yang terbaik".

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan sala satu Kepala Sekolah SD di distrik Pisugi mengatakan bahwa: "Kami punya banyak anak yang datang dari kampung tetangga. Mereka harus jalan kaki dua sampai empat jam setiap hari. Kadang mereka terlambat, kadang tidak datang sama sekali, ini membuat tingkat kehadiran siswa di sekolah kami terhambat. Selanjutnya untuk di tempat yang berbeda peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala SMP Negeri I Kurulu Veronika Sorabut di Distrik Kurulu menyampaikan bahwa: "Anak-anak di sini harus jalan kaki lebih dari empat jam kalau mau ke SMP. Tidak ada kendaraan umum, jalan pun jelek. sebagian siswa yang melanjutkan ke SMP terpaksa tinggal di rumah keluarga di Wamena atau bahkan menumpang di rumah guru, yang tentu tidak semua anak bisa melakukannya karena keterbatasan ekonomi. Selanjutnya berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten jayawijaya khususnya di pedalam Hisage peneliti melakukan wawancara dengan seorang tokoh masyarakat dipedalam Itlay Hisage Yohanis Elopere mengatakan: "Masyarakat kami sebenarnya mau anak-anak sekolah. Tapi kalau harus jalan kaki tiga jam lebih, naik turun gunung, dan sering melewati tempat berbahaya, bagaimana? Apalagi kalau tidak ada uang untuk bayar transportasi atau tinggal di kota. Ini bukan kami tidak peduli pendidikan, tapi memang kenyataannya begini." Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada distrik Itlay Hisage, Pisugi, Pelebaga, dan Hubikosi, peneliti mencatat beberapa fakta lapangan:

1. Jarak tempuh siswa ke sekolah rata-rata 2 hingga 5 jam jalan kaki, melewati medan berbukit, sungai, dan hutan.

2. Tidak ada akses transportasi umum menuju sekolah di sebagian besar distrik pedalaman.
3. Anak-anak yang bersekolah di Wamena harus tinggal di rumah kerabat atau kos, yang tidak semua keluarga mampu biyai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, beberapa masalah utama terkait aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

1. Jarak Tempuh Jauh dan Medan Berat. Mayoritas siswa harus berjalan kaki berjam-jam untuk sampai ke sekolah
2. Tidak Tersedianya Sarana Transportasi Umum. Tidak ada kendaraan umum ke sekolah, dan biaya transportasi ojek terlalu mahal bagi masyarakat.
3. Kekhawatiran Keamanan. Orang tua, terutama di pedalaman, khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka di perjalanan, khususnya anak perempuan.

Berdasarkan urain hasil wawancara dan observasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, khususnya di distrik-distrik pedalaman, masih menjadi kendala utama dalam pemerataan pendidikan. Faktor jarak yang jauh, tidak tersedianya transportasi, dan kekhawatiran terhadap keamanan anak menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi sekolah, terutama di jenjang SMP dan SMA. Kondisi ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan, tidak hanya dalam pembangunan sekolah yang lebih dekat dengan pemukiman masyarakat, tetapi juga penyediaan transportasi sekolah, pembangunan asrama siswa, dan peningkatan infrastruktur jalan sebagai upaya nyata meningkatkan akses pendidikan di wilayah ini.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses dan Kesetaraan Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, khususnya di wilayah pedalaman, dihadapkan pada berbagai faktor yang mempengaruhi akses dan kesetaraan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, serta pengamatan langsung di lapangan, ditemukan bahwa faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk rantai permasalahan yang kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya dapat dikelompokkan menjadi lima kategori utama: faktor geografis, faktor ekonomi, faktor sosial-budaya, faktor sarana prasarana, dan faktor kebijakan dan pengelolaan pendidikan.

1. Faktor Geografis dan Kondisi Alam. Berkaitan dengan Faktor geografis dan kondisi alam yang turut mempengaruhi akses dan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Natalis Mumpu. S.Sos mengatakan bahwa: "Hampir semua distrik di Jayawijaya adalah daerah pegunungan. Untuk mencapai satu kampung ke kampung lain, sering kali harus jalan kaki berjam-jam melewati sungai dan gunung. Ini membuat sekolah-sekolah di pedalaman sulit diawasi, sulit dibangun, dan sulit diakses oleh anak-anak." Dari hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan oleh peneliti bahwa kondisi geografis Kabupaten Jayawijaya yang didominasi wilayah pegunungan, lembah, dan akses jalan yang sulit menjadi salah satu hambatan utama pemerataan pendidikan.
2. Faktor Sosial dan Budaya. Faktor sosial-budaya juga menjadi determinan penting dalam akses pendidikan. Tradisi masyarakat lokal, pola pikir, dan pandangan tentang pendidikan sangat mempengaruhi keputusan orang tua dalam menyekolahkan anak. Berkaitan dengan faktor social dan budaya yang turut mempengaruhi pendikan maka peneliti melakukan wawancara dengan seorang tokoh masyarakat di Itlay HisageYohanis Elopere mengatakan bahwa: "Berbicara soal faktor yang mempengaruhi ini bisa saja faktor internal maupun

faktor eksternal, faktor internalnya adalah banyak orang tua berpikir lebih baik anak bantu di kebun dan berburu dari pada sekolah. Dari hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan sebagian masyarakat masih memandang pendidikan sebagai sesuatu yang tidak mendesak, terutama di kalangan petani

3. Faktor Sarana dan Prasarana Pendidikan. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang buruk menjadi faktor utama yang menghambat akses dan kesetaraan pendidikan. Senada dengan ini maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD YPPGI Pyramid mengatakan bahwa: "Jujur yah kalau persoalan sarana dan prasarana ini memang kami sini masih sangat terbatas mulai dari sarana penunjang seperti perpustakaan, akses internet, dan ketersediaan guru. Faktor inilah yang mempengaruhi dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah perkotaan karena mereka memiliki fasilitas yang memadai". Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang buruk menjadi faktor utama yang menghambat akses dan kesetaraan Pendidikan khususnya di daerah-daerah pedalaman.
4. Faktor Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan. Masalah kebijakan dan pengelolaan pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk ketimpangan akses dan kesetaraan pendidikan. Penelitian ini mengangkat faktor kebijakan dan pengelolaan pendidikan sebagai salah satu indikator penting dalam menganalisis akses dan kesetaraan pendidikan selama pemberlakuan otonomi khusus di Kabupaten Jayawijaya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Natalis Mumpu. S.Sos mengatakan bahwa: "Secara normatif, alokasi dana Otonomi Khusus untuk pendidikan memang cukup besar. Namun pada implementasinya, perencanaan yang tidak berbasis data menyebabkan program tidak tepat sasaran. Sebagian besar dana masih terserap untuk kegiatan non-strategis, bukan pada penguatan sarana dan peningkatan kapasitas guru di daerah terpencil."

Berdasarkan analisis terhadap data hasil wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi dari Dinas Pendidikan, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendidikan Tidak Berbasis Data Daerah. Perencanaan pendidikan cenderung bersifat top-down tanpa melibatkan aktor lokal, seperti kepala sekolah dan tokoh masyarakat. Hal ini menyebabkan intervensi kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
2. Minimnya Transparansi Pengelolaan Dana Otsus. Dana Otsus yang dialokasikan untuk sektor pendidikan tidak disertai dengan mekanisme pelaporan yang akuntabel dan partisipatif. Penggunaan anggaran tidak terpantau secara terbuka, dan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengawasan.
3. Lemahnya Monitoring dan Evaluasi. Tidak terdapat sistem evaluasi berkala atas pelaksanaan program pendidikan. Akibatnya, berbagai permasalahan seperti ketidakhadiran guru, kerusakan sekolah, dan kekurangan tenaga pengajar tetap terjadi berulang tanpa solusi.
4. Tumpang Tindih Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Kebijakan Otsus menyebabkan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah kabupaten, khususnya dalam pengelolaan pendidikan menengah.

Berdasarkan analisis terhadap data hasil wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor kebijakan dan pengelolaan pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas akses dan kesetaraan pendidikan di Jayawijaya. Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan publik oleh George Edward III, kegagalan implementasi sering terjadi karena lemahnya komunikasi,

sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya yaitu pertama komunikasi antara pemerintah dan sekolah belum berjalan optimal. Sosialisasi program dan mekanisme pengambilan keputusan masih elitis dan terpusat. Kedua sumber daya yang minim, baik dari aspek SDM maupun logistik, menjadi hambatan utama dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Ketiga sikap pelaksana kebijakan cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan lokal karena tidak ada insentif dan sistem akuntabilitas yang jelas. Keempat struktur birokrasi pendidikan masih tumpang tindih akibat dualisme peran antara provinsi dan kabupaten. Maka dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya bukan semata pada ketersediaan dana, melainkan pada buruknya tata kelola kebijakan pendidikan, terutama dalam konteks implementasi Otonomi Khusus yang seharusnya memberikan fleksibilitas lebih besar dalam membangun sistem pendidikan yang kontekstual dan berkeadilan.

Pembahasan

Rasio Ketersediaan Sekolah dan Guru di Kabupaten Jayawijaya

Indikator rasio ketersediaan sekolah dan guru merupakan salah satu komponen utama dalam mengukur kualitas dan pemerataan akses serta kesetaraan pendidikan. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah, melalui dukungan kebijakan otonomi khusus, telah menyediakan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik secara adil dan merata di seluruh wilayah, terutama di distrik-distrik terpencil dan sulit dijangkau. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya serta para informan seperti kepala sekolah, guru, dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa terdapat 207 unit SD, 76 unit SMP, dan hanya 25 unit SMA di seluruh kabupaten, sebagian besar sekolah terkonsentrasi di kota Wamena dan distrik-distrik yang mudah dijangkau, distrik-distrik terpencil seperti Pisugi, Itlay Hisage, dan Pelebaga mengalami keterbatasan sekolah menengah dan bahkan belum memiliki SMA sama sekali, sebanyak 49 unit SD, 18 SMP, dan 5 SMA berada dalam kondisi rusak berat dan tidak layak pakai, dari sekitar 1.300 ruang kelas, lebih dari 230 berada dalam kondisi rusak berat, rasio guru dengan jumlah siswa sangat tidak seimbang, khususnya di SD dan SMP. Ada sekolah yang hanya memiliki 1–2 guru aktif untuk melayani puluhan siswa, banyak guru tidak tinggal di tempat tugas karena ketiadaan rumah dinas dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Van Tudler 2014, menjelaskan bahwa akses pendidikan ditentukan oleh beberapa aspek, termasuk ketersediaan fasilitas fisik (gedung sekolah, ruang kelas, dan sarana belajar) serta ketersediaan tenaga pengajar yang memadai. Ketimpangan dalam distribusi sekolah dan guru secara langsung menghambat akses anak-anak terhadap pendidikan. Lebih lanjut, Sánchez dan Singh 2016 menekankan bahwa akses pendidikan juga ditentukan oleh keterjangkauan geografis dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Di Jayawijaya, keterbatasan sekolah di distrik pedalaman menyebabkan anak-anak harus menempuh perjalanan 2–4 jam berjalan kaki, bahkan dalam kondisi cuaca ekstrem. Ini menjadi hambatan besar dalam realisasi hak atas pendidikan yang merata.

Kebijakan Otonomi Khusus dan Implementasi di Sektor Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, salah satu mandat utama adalah meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Dana Otsus yang digelontorkan seharusnya dimanfaatkan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan serta merekrut dan mendistribusikan tenaga guru secara adil. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa alokasi dana Otsus belum sepenuhnya menyasar pemerataan sekolah dan guru di distrik terpencil. Banyak kepala sekolah menyatakan bahwa anggaran masih terserap pada program proyek fisik di kota, sementara kebutuhan dasar seperti ruang kelas dan rumah

dinas guru di kampung-kampung belum tertangani dengan serius. Implikasi dan Dampaknya kondisi rasio sekolah dan guru yang tidak seimbang ini berdampak pada:

1. Rendahnya angka partisipasi sekolah di daerah pedalaman.
2. Tingginya angka putus sekolah, terutama di jenjang SMP dan SMA.
3. Kualitas pembelajaran rendah karena minimnya guru berkualitas dan keterbatasan fasilitas.
4. Ketimpangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) antar distrik yang makin melebar.

Dampak ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan Otonomi Khusus belum optimal menjawab kebutuhan dasar pendidikan masyarakat adat Papua Pegunungan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam indeks kesejahteraan dan kemajuan suatu wilayah. Jika merujuk pada pendekatan teori kebijakan publik (Easton, 1965), maka kebijakan pendidikan dalam konteks Otsus Papua di Jayawijaya belum mencapai distribusi nilai yang adil. Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan belum sepenuhnya menjalankan prinsip equity dan responsiveness terhadap kebutuhan daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terpencil). Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasio ketersediaan sekolah dan guru di Kabupaten Jayawijaya masih menunjukkan ketimpangan serius antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Meskipun ada kebijakan otonomi khusus dan alokasi dana besar, implementasinya belum menyentuh pemerataan infrastruktur dan tenaga pendidik secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan perencanaan, distribusi sumber daya, dan pengawasan kebijakan, akses dan kesetaraan pendidikan tetap menjadi masalah struktural yang belum terselesaikan di Papua Pegunungan.

Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, serta wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, ditemukan sejumlah fakta sebagai berikut dari 207 SD yang ada, hanya 85 unit dalam kondisi baik, sementara 73 unit rusak ringan, dan 49 unit rusak berat, sedangkan 76 SMP dan 25 SMA, kondisi yang rusak berat ditemukan paling banyak di distrik pedalaman seperti Itlay Hisage, Wouma, dan Pelebaga, terdapat sekitar 1.300 ruang kelas, Fasilitas penunjang sangat minim, fasilitas toilet dan sanitasi buruk: dari ±680 unit toilet, hanya sekitar 360 dalam kondisi layak, dan banyak yang tidak memiliki air bersih, akses listrik belum merata, terutama di wilayah yang tidak tersentuh jaringan PLN. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah di Kabupaten Jayawijaya tidak memenuhi standar minimum fasilitas pendidikan, dan kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas proses pembelajaran, ketidakhadiran guru, serta rendahnya motivasi siswa. Van Tudler menyatakan bahwa akses terhadap pendidikan sangat ditentukan oleh tersedianya sarana fisik yang memadai, seperti gedung sekolah, ruang belajar yang layak, fasilitas sanitasi, dan media pembelajaran. Dalam konteks Jayawijaya, minimnya fasilitas dasar ini menjadi hambatan struktural yang serius terhadap keberlangsungan pendidikan. Alan Sánchez dan Abhijeet Singh (2016) menegaskan bahwa akses pendidikan yang rendah di daerah tertinggal disebabkan oleh buruknya kondisi infrastruktur dan ketidakterediaan layanan dasar, seperti listrik dan sanitasi. Ini terbukti dari kondisi di lapangan, di mana banyak sekolah tidak memiliki toilet layak, air bersih, bahkan meja dan kursi siswa yang cukup.

Menurut teori kesetaraan pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO, sarana pendidikan yang layak adalah indikator utama dari sistem pendidikan yang setara. Dalam wilayah yang tertinggal seperti Kabupaten Jayawijaya, ketimpangan sarana dan prasarana memperlebar jurang ketidaksetaraan antara distrik pusat seperti Wamena dan distrik terpencil. Kamil (2009) menyatakan bahwa kesetaraan bukan hanya tentang kesempatan belajar, tetapi juga tentang kualitas lingkungan belajar yang tersedia bagi siswa. Jika di satu sisi

ada sekolah dengan fasilitas lengkap di pusat kota, namun di sisi lain ada siswa yang belajar di bangunan semi permanen tanpa toilet, maka ketimpangan pendidikan semakin nyata. Berdasarkan uraian yang telah di paparkan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya masih jauh dari memadai dan belum mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Otonomi Khusus. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana yang signifikan melalui Dana Otsus, distribusinya belum menjangkau wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Keterbatasan ini berdampak langsung pada proses pembelajaran, motivasi guru, serta angka partisipasi dan keberlanjutan pendidikan di daerah pedalaman. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan anggaran, pengawasan pembangunan infrastruktur pendidikan, dan pemberdayaan komunitas lokal dalam proses perencanaan pendidikan.

Aksesibilitas Pendidikan

Aksesibilitas pendidikan mencerminkan sejauh mana layanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari aspek geografis, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, aksesibilitas pendidikan masih menjadi persoalan struktural yang kompleks, yang tidak hanya menyangkut jarak fisik menuju sekolah, tetapi juga hambatan ekonomi, kondisi geografis ekstrem, dan pandangan sosial masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan informan seperti orang tua, guru, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat, serta hasil observasi lapangan, ditemukan fakta sebagai berikut partam banyak siswa di distrik seperti Pisugi, Itlay Hisage, dan Wouma harus berjalan kaki 2–4 jam menuju sekolah terdekat. Kedua ketiadaan transportasi umum dan buruknya kondisi jalan memperparah kesulitan anak-anak untuk menjangkau sekolah. Ketiga faktor ekonomi menjadi kendala serius: banyak keluarga tidak mampu menyediakan seragam, alat tulis, atau ongkos transportasi anak ke sekolah. Keempat budaya lokal dan kebiasaan hidup tradisional membuat sebagian masyarakat belum memprioritaskan pendidikan, terutama untuk anak perempuan. Van Tudler menegaskan bahwa akses pendidikan bukan sekadar tentang tersedianya sekolah, tetapi juga soal keterjangkauan secara fisik, ekonomi, dan sosial. Dalam penelitian ini, semua aspek itu mengalami hambatan di Jayawijaya yaitu akses fisik terhambat oleh topografi pegunungan dan jarak tempuh yang jauh ke sekolah, akses ekonomi terhambat oleh kemiskinan struktural yang membatasi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak, akses sosial terhambat oleh nilai-nilai budaya lokal yang belum mengintegrasikan pentingnya pendidikan formal sebagai kebutuhan utama.

Sementara itu, Sánchez dan Singh (2016) menjelaskan bahwa aksesibilitas pendidikan erat kaitannya dengan sistem dukungan lingkungan, seperti tersedianya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebijakan afirmatif. Namun, di Jayawijaya, sistem pendukung ini belum tersedia atau belum berjalan optimal. Menurut UNESCO, kesetaraan dalam pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan kualitas, tetapi juga kemampuan anak untuk mengakses pendidikan secara bebas tanpa hambatan geografis, sosial, atau ekonomi. Dalam penelitian ini terlihat jelas bahwa anak-anak di distrik terpencil tidak berada dalam posisi yang setara dibanding anak-anak yang tinggal di Wamena atau pusat kabupaten. Kamil (2009) menekankan bahwa akses pendidikan harus didukung dengan layanan transportasi, kebijakan beasiswa, dan kesadaran keluarga. Tanpa itu, anak-anak dari kelompok marjinal akan terus terpinggirkan. Di Jayawijaya, belum ada sistem afirmatif yang menyentuh langsung anak-anak di kampung-kampung jauh dari pusat kota. Implementasi Otonomi Khusus dan Akses Pendidikan dalam konteks kebijakan, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara eksplisit mengamanatkan agar dana Otsus digunakan untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat Papua, terutama di daerah pegunungan dan terpencil. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa

dana Otsus belum dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun sekolah di distrik-distrik tertinggal, tidak ada program transportasi sekolah khusus atau afirmasi lain untuk anak-anak di daerah sulit, belum ada distribusi insentif atau fasilitas bagi guru yang bertugas di daerah ekstrem, sehingga sekolah-sekolah yang sudah dibangun pun sering kosong. Jika dikaitkan dengan teori kebijakan publik menurut Easton dan Anderson, maka pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus di Jayawijaya belum menjawab nilai dan kebutuhan nyata masyarakat lokal. Tidak tersedianya program dukungan transportasi, beasiswa afirmatif, atau insentif bagi guru di daerah terpencil menunjukkan rendahnya sensitivitas kebijakan terhadap konteks sosial-geografis masyarakat Papua Pegunungan. Aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Jayawijaya masih sangat terbatas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di distrik terpencil dan berbukit. Faktor geografis, ekonomi keluarga, dan budaya lokal menjadi penghambat utama. Meski Otonomi Khusus telah memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola pendidikan secara lebih fleksibel, implementasinya belum berpihak pada kelompok yang paling rentan. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat dan berbasis kebutuhan lokal, akses pendidikan di daerah ini akan tetap timpang dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial antar wilayah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses dan Kesetaraan Pendidikan

Pendidikan yang merata dan setara merupakan fondasi penting bagi pembangunan manusia dan kemajuan suatu wilayah. Di Kabupaten Jayawijaya, realisasi akses dan kesetaraan pendidikan masih menghadapi tantangan besar yang berasal dari kombinasi faktor geografis, sosial, ekonomi, kultural, infrastruktur, hingga kelemahan implementasi kebijakan otonomi khusus. Penelitian ini mengungkapkan enam faktor utama yang mempengaruhi akses dan kesetaraan pendidikan di Jayawijaya. Setiap faktor ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, menciptakan lingkaran ketimpangan pendidikan yang sulit diputus.

1. **Faktor Geografis dan Topografis.** Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah pegunungan yang memiliki topografi ekstrem. Beberapa distrik seperti Wadanku, Pisugi, dan Itlay Hisage sulit diakses karena tidak terhubung oleh jalan darat yang memadai. Transportasi udara menjadi satu-satunya cara untuk mencapai beberapa kampung, namun biaya yang tinggi membuatnya tidak terjangkau. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak anak-anak harus berjalan kaki 2–5 jam untuk mencapai sekolah, melewati medan berat seperti bukit, sungai, dan hutan lebat. Dalam musim hujan, akses menjadi semakin sulit, menyebabkan banyak siswa absen atau berhenti sekolah sama sekali.
2. **Faktor Ekonomi dan Kemiskinan Keluarga.** Mayoritas penduduk Jayawijaya bekerja di sektor informal atau sebagai petani subsisten dengan pendapatan rendah dan tidak tetap. Orang tua kesulitan membiayai keperluan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, dan uang transportasi anak. Kondisi ini diperparah dengan tidak tersedianya program beasiswa afirmatif secara merata. Wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah setelah SD karena orang tua tidak mampu membiayai pendidikan lanjutan, terutama ke SMP atau SMA yang letaknya jauh dari kampung mereka.
3. **Faktor Sosial Budaya dan Nilai Tradisional.** Nilai-nilai budaya lokal masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa komunitas adat, pendidikan belum dianggap sebagai kebutuhan utama. Anak-anak lebih diprioritaskan untuk membantu orang tua di kebun, menjaga ternak, atau mengikuti kegiatan adat. Pendidikan untuk anak perempuan seringkali tidak dianggap penting, karena mereka dipersiapkan untuk menikah dan mengurus rumah tangga sejak usia muda. Hal ini berdampak pada tingkat partisipasi yang rendah, khususnya bagi anak perempuan dan anak-anak dari keluarga adat yang sangat tradisional. Wawancara menunjukkan bahwa beberapa kepala kampung masih menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang “luar” dan tidak sesuai dengan sistem nilai lokal.

4. Faktor Sarana dan Prasarana Pendidikan. Dari hasil observasi dan data Dinas Pendidikan, sebagian besar sekolah di distrik terpencil berada dalam kondisi rusak berat, tanpa fasilitas belajar yang memadai. Banyak sekolah tidak memiliki toilet, air bersih, perpustakaan, maupun laboratorium. Selain itu, kekurangan rumah dinas guru menyebabkan para guru enggan bertugas di wilayah tersebut dan lebih memilih mengajar di daerah perkotaan. Kondisi fisik ini berdampak langsung pada kenyamanan dan semangat belajar siswa, serta menurunkan kualitas pembelajaran yang berlangsung.
5. Faktor Ketersediaan dan Distribusi Guru. Distribusi guru sangat tidak merata. Guru lebih banyak tersebar di kota Wamena, sedangkan sekolah di distrik pedalaman kekurangan guru tetap. Bahkan terdapat sekolah yang hanya memiliki satu guru untuk seluruh jenjang kelas, atau guru tidak aktif hadir karena tinggal jauh dari lokasi sekolah. Guru yang ditugaskan ke daerah terpencil seringkali mengajukan pindah karena merasa tidak nyaman dan tidak mendapatkan fasilitas pendukung seperti insentif, tempat tinggal, atau tunjangan medan berat.
6. Faktor Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus. Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang disalurkan sejak 2001 hingga kini belum mampu menyelesaikan persoalan akses dan kesetaraan pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa alokasi dana lebih sering diarahkan pada program jangka pendek seperti pelatihan atau pembangunan proyek fisik di pusat kota, tanpa menysasar akar persoalan di wilayah pinggiran. Wawancara dengan pejabat dinas menyebutkan bahwa perencanaan tidak berbasis data riil, minim pelibatan masyarakat lokal, dan pengawasan pelaksanaan program pendidikan masih lemah.

Analisis secara teoretis ini menekankan bahwa akses terhadap pendidikan mencakup dimensi fisik (jarak, fasilitas), ekonomi (kemampuan membiayai), dan sosial (dukungan keluarga dan masyarakat). Dalam konteks Jayawijaya, seluruh dimensi ini mengalami kendala serius. Menurut Sánchez & Singh, jika tidak ada intervensi afirmatif, maka anak-anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil akan tetap berada dalam kondisi ketidaksetaraan akses, yang berdampak pada kesenjangan sosial dalam jangka panjang. UNESCO menyatakan bahwa pendidikan yang setara harus memberikan peluang dan sumber daya yang lebih besar bagi mereka yang berada dalam posisi tidak menguntungkan. Kamil menambahkan bahwa kesetaraan menuntut adanya diferensiasi dukungan, bukan perlakuan yang sama rata. Dalam penelitian ini, tidak ada dukungan khusus seperti subsidi pendidikan, transportasi gratis, atau program afirmasi berbasis wilayah, sehingga anak-anak di distrik pedalaman tetap tertinggal. Implikasi dari Faktor-Faktor Penghambat di atas berlangsung secara simultan, dampaknya sangat serius seperti meningkatnya angka putus sekolah, khususnya di jenjang SMP dan SMA, kualitas SDM lokal menurun, karena pendidikan dasar tidak tuntas, ketimpangan antar wilayah makin lebar: pusat kabupaten berkembang, distrik terpencil stagnan, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan kemiskinan struktural yang berulang antar generasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kesetaraan pendidikan di Jayawijaya menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan pendidikan selama ini belum berbasis kebutuhan lokal. Perlu ada transformasi dalam perencanaan, distribusi sumber daya, dan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan program pendidikan. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konteks lokal, budaya, dan kondisi geografis masyarakat Papua Pegunungan. Jika pendekatan tetap bersifat "top-down" dan umum, maka ketimpangan akan terus berlangsung, dan anak-anak asli Papua akan tetap tertinggal di tanahnya sendiri. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya bersifat struktural dan multidimensi. Kombinasi antara hambatan geografis, ekonomi, budaya, infrastruktur, distribusi guru, dan lemahnya kebijakan

otonomi khusus menciptakan sistem pendidikan yang tidak inklusif dan tidak setara. Tanpa intervensi afirmatif dan kebijakan berbasis keadilan sosial, anak-anak dari distrik pedalaman akan terus berada dalam kondisi pendidikan yang terpinggirkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akses dan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya selama masa pemberlakuan Otonomi Khusus, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Guru. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketimpangan signifikan dalam rasio ketersediaan sekolah dan guru antara wilayah pusat (khususnya Kota Wamena) dengan distrik-distrik terpencil. Meskipun jumlah sekolah dasar cukup memadai secara kuantitatif, namun jumlah sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas masih sangat terbatas. Sementara itu, ketersediaan guru, terutama di daerah pedalaman, masih mengalami kekurangan serius. Banyak guru enggan bertugas di wilayah pedalaman karena kondisi geografis yang sulit dijangkau dan ketiadaan rumah dinas yang layak.
2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya belum memadai. Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan sekolah berada dalam kondisi rusak sedang hingga berat, terutama di luar wilayah kota. Ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas dasar lainnya seperti toilet dan air bersih tidak tersedia secara merata. Kekurangan ini berdampak pada rendahnya kualitas proses pembelajaran.
3. Aksesibilitas Pendidikan. Faktor geografis menjadi tantangan utama dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata. Banyak peserta didik di wilayah terpencil harus menempuh perjalanan selama 2 hingga 4 jam dengan berjalan kaki untuk mencapai sekolah terdekat. Bahkan, terdapat kampung yang sama sekali belum memiliki fasilitas sekolah formal. Selain itu, akses transportasi yang terbatas dan medan yang sulit dijangkau menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah, khususnya di kalangan anak-anak usia sekolah dasar dan menengah.
4. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Budaya. Faktor kemiskinan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta praktik-praktik sosial seperti pernikahan dini dan pembagian peran tradisional turut memengaruhi ketimpangan akses dan kesetaraan pendidikan. Selain itu, minimnya intervensi dalam bentuk sosialisasi pendidikan kepada masyarakat adat juga menghambat tumbuhnya budaya belajar di kalangan masyarakat.
5. Dampak Kebijakan Otonomi Khusus terhadap Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka, diketahui bahwa kebijakan Otonomi Khusus belum secara optimal meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Jayawijaya. Alokasi dana yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan pendidikan, belum sepenuhnya direalisasikan secara efektif. Realisasi kebijakan masih terhambat oleh lemahnya pengawasan, terbatasnya sumber daya manusia pengelola, dan kurangnya evaluasi kebijakan secara menyeluruh terhadap hasil yang dicapai.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perluasan dan Pemerataan Fasilitas Pendidikan. Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya bersama Dinas Pendidikan harus melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pembangunan sekolah baru dan rehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat harus menjadi prioritas, terutama di distrik-distrik yang belum memiliki akses pendidikan formal.

2. Peningkatan Distribusi dan Kesejahteraan Guru. Perlu adanya kebijakan afirmatif untuk mendorong pemerataan distribusi guru, termasuk pemberian insentif khusus, tunjangan daerah terpencil, serta pembangunan rumah dinas guru di wilayah pedalaman. Pemerintah juga dapat merekrut dan mendidik tenaga pendidik dari putra-putri daerah agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan bersedia mengabdikan dalam jangka panjang.
3. Optimalisasi Alokasi Dana Otonomi Khusus. Alokasi Dana Otonomi Khusus harus difokuskan pada sektor pendidikan, terutama pada pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan penyediaan sarana pendukung pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, serta alat bantu ajar. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini melalui pengawasan partisipatif.
4. Peningkatan Akses Transportasi dan Infrastruktur Penunjang. Mengingat kendala geografis yang sangat memengaruhi akses pendidikan, perlu dilakukan pembangunan infrastruktur transportasi berupa jalan penghubung antar kampung dan distrik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban perjalanan peserta didik menuju sekolah dan meningkatkan kehadiran siswa secara signifikan.
5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menyosialisasikan pentingnya pendidikan. Pendekatan kultural yang menghargai nilai-nilai lokal akan lebih diterima dan mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.
6. Perumusan Kebijakan Pendidikan Kontekstual Berbasis Lokal. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan pendidikan yang mempertimbangkan karakteristik lokal masyarakat pegunungan Papua. Kurikulum kontekstual yang memasukkan nilai-nilai budaya lokal serta pendekatan belajar yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat akan meningkatkan keterlibatan siswa dan relevansi pendidikan.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini melalui media tulisan penulis menghanturkan terima kasih dan bangga yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendorong dan juga memotivasi pada pengerjaan skripsi ini, khususnya kepada

1. Dr. Frican Tutuarima, S.Pd., M.Pd, sebagai pembimbing utama dan Dr. A.M.D.Ratuanak, SH.,MM.,M.Hum sebagai pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing serta membekali, memberi arahan dengan penuh kasih dan memotivasi serta selalu mendoakan penulis dalam setiap proses pembimbingan berlangsung hingga selesai dalam penelitian ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mengajar, membimbing, membina serta mendidik penulis dengan berbagai Ilmu Pengetahuan baik di dalam maupun di luar ruangan selama proses perkuliahan.
3. Untuk kedua orang tuaku yang tidak pernah putus berdoa, dan selalu memberikan semangat dan dorongan kepada saya sehingga berada di titik ini.
4. Sahabat-sahabat yang sudah memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa berada pada tahap ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Majid. (2014). *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Amin, M., Husain, H., & Syafar, M. (2020). *Optimalisasi Dana Otonomi Khusus Dalam Meningkatkan Sektor Pendidikan di Papua*. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 110–122.
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.

- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Logos Wacana Ilmu.
- BP PAUD dan DIKMAS DIY. (2018). *Panduan Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Didi Trisidi. (2016). *Aksesibilitas Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Diakses dari: <http://file.upi.edu>
- Edyanto, R., Setiawan, A., & Liswandi, L. (2021). *Evaluasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Papua*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 25(1), 22–35.
- Eryanto, H., Lestari, P., & Prasetyo, M. (2021). *Penguatan Pendidikan melalui Dana Otonomi Khusus di Papua Pegunungan*. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah, 9(2), 134–148.
- Hardinandar. (2019). *Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap IPM di Provinsi Papua*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 7(1), 45–59.
- Helaluddin & Wijaya, R. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. CV. Jejak.
- Hermawan, A., Suyatno, & Purwanto, W. (2012). *Pendidikan Kesetaraan dan Implementasinya dalam Pendidikan Nonformal*. Jurnal Pendidikan Nonformal, 4(2), 19–28.
- Istiqomah, A., Fakhruddin, M., & Usman, H. (2017). *Pendidikan Kesetaraan sebagai Solusi Putus Sekolah*. Jurnal Pendidikan Masyarakat, 6(1), 56–65.
- Kamil, M. (2009). *Pendidikan Nonformal: Pengembangan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 5(2), 99–110.
- Kebijakan, A., Pembangunan, D., & Sosial, K. (2023). *Efektivitas Kebijakan Otonomi Khusus dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 8(1), 72–84.
- Kolondam, E. (2018). *Kebijakan Dana Otonomi Khusus Papua: Peluang dan Tantangan dalam Sektor Pendidikan*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 24(3), 41–55.
- Marrit, C. (2018). *Pendidikan dan Otonomi Khusus Papua*. Jurnal Otonomi Daerah, 3(1), 55–68.
- Modouw, J. (2018). *Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan SDM*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 14(1), 87–97.
- Nomensen Steffan Mambraku. (2019). *Efektivitas Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Pendidikan di Papua*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik, 2(2), 90–106.
- Oktavian, R., Sari, N., & Hidayat, A. (2021). *Dampak Otonomi Khusus Terhadap Layanan Pendidikan di Provinsi Papua*. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 10(1), 32–48.
- Parsons, W. (1995). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar.
- Pribadi, A. (2015). *Hak Atas Pendidikan Dalam Konstitusi Indonesia*. Jurnal Konstitusi dan HAM, 7(1), 18–29.
- Rahman, Z., & Kartini, D. S. (2023). *Analisis Dampak Otonomi Khusus dalam Upaya Optimalisasi Sektor Pendidikan di Provinsi Papua*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 6(2), 100–112.
- Rahmat, R. (2016). *Pendidikan Kesetaraan sebagai Upaya Mewujudkan Pendidikan untuk Semua*. Jurnal Pendidikan Nonformal, 2(1), 15–28.
- Sánchez, A., & Singh, A. (2016). *Access to Education and Social Disparity*. World Bank Policy Research Working Paper, No. 7982.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Edisi Terbaru)*. Alfabeta.
- Syafii, M. (2018). *Masalah Pendidikan di Papua: Perspektif Sosial dan Struktural*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 18(2), 143–158.
- Taufiqurahman, T. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Pelayanan Pendidikan*. Jurnal Administrasi Negara, 9(1), 1–12.

- Van Tudler, M. (2014). *Education Accessibility in Remote Areas: A Global Overview*. International Journal of Education Development, 34(3), 211–219.
- Zawahir, P. M., Samputra, P. L., & Kharisma, V. D. (2020). *Analisis Dampak Alokasi Dana Otsus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 8(1), 12–25.